

ANALISIS DETERMINAN PENGALOKASIAN BELANJA MODAL

Jouzar Farouq Ishak¹, Citra Sukmadilaga², dan Aam Rachmat Mulyana³

¹Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Bandung Barat, 40012

²Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Jl. Hegarmanah, Sumedang, 45363

³Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, 40533

E-mail: jouzar.farouq@polban.ac.id

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia is a unitary state that adheres to the principle of regional autonomy. The existence of regional autonomy gives authority and obligation to regulate and manage various government activities independently. This study aims to analyze the determinants of capital expenditure allocations in districts or cities in West Java Province. The main problem to be resolved in this study is the improvement of regional financial management by increasing the capital expenditure budget. Another issue to be resolved is by providing input to the Regional Government with an increase in the potential of original regional income. This research method begins with a literature study the government of Original Local Government Revenue, Balance Budget, Other Legal Revenue, and Capital Expenditures. This literature study produces several information for the Government both the Regional Government and the Central Government in the form of Original Local Government Revenue, Balance Budget, Other Legal Revenue, and Capital Expenditures so that it can be used as a basis for the Regional Government and the Central Government in managing Government finances. The results showed original local government revenue significantly influences capital expenditure. Simultaneously, the influence of the three factors above on capital expenditure also showed significant results.

Keywords: *Original Local Government Revenue, Balanced Budget, Other Legal Revenue, Capital Expenditure*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal rata-rata masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi juga mengalami hal yang sama, yaitu relatif rendahnya kemandirian di bidang pembiayaan bersumber dari pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Persoalan utama yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan peningkatan anggaran belanja modal. Persoalan lain yang akan diselesaikan adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan dengan potensi pendapatan asli daerah. Metode penelitian dengan studi pustaka tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan belanja modal sehingga dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan, pengaruh ketiga faktor di atas terhadap belanja modal juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil penelitian hanya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, tidak bisa di pakai untuk pertimbangan pengambilan keputusan di wilayah Pemerintah Daerah di provinsi yang berbeda.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Belanja Modal*

PENDAHULUAN

Asas otonomi daerah dianut oleh Pemerintah Indonesia setelah terjadinya reformasi di negeri ini. Berbagai aktivitas yang dilakukan pemerintah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga pemerintah daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara independen serta berdikari (Pemerintah Indonesia, 2014). Pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal dengan dukungan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat merupakan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah. Perpacuan investasi di daerah oleh investor berakibat pada peningkatan pelayanan sektor publik yang berkaitan dengan pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri (Jaya & Dwirandra, 2014).

Kemandirian dalam pengaturan keuangan daerah sangat penting. Pengoptimalan pendapatan oleh daerah dikarenakan daerah diberikan wewenang menggali potensi pajaknya itu sendiri. Pertumbuhan daerah dapat terlaksana dengan optimal bilamana daerah tersebut bisa terjadi peningkatan penerimaan pajak daerahnya. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (Widjaya et al., 2018). Pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal rata-rata masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Anggaran belanja hanya terkonsentrasi pada belanja-belanja yang bersifat rutin dan mengesampingkan belanja modal (Andriana & Yuliana, 2016).

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas maka terdapat perubahan komposisi belanja. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Maharani, 2010). Anggaran belanja modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pengeluaran aset tetap. Belanja modal adalah jenis pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan (Muda & Naibaho, 2018).

Berdasarkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa rata-rata perbandingan rasio belanja modal secara nasional pada tahun 2017 sebesar 18,7%, sedangkan Provinsi Jawa Barat menempati rasio belanja modal terendah dengan 7,1%. Pada tahun 2018, rata-rata perbandingan

rasio belanja modal secara nasional pada tahun 2018 sebesar 18,1% di mana rasio belanja modal Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata secara nasional sebesar 10,7%.

Penelitian mengenai belanja telah banyak dilakukan dengan variabel pendukung seperti: pendapatan asli daerah (Jaya & Dwirandra, 2014); (Maharani, 2010); (Tuasikal, 2008), dana perimbangan (Nuarisa, 2013); (Wandira, 2013), dan lain-lain pendapatan yang sah. Penelitian tentang analisis determinan belanja telah dilakukan oleh (Andriana & Yuliana, 2016); (Hardiningsih & Oktaviani, 2013); (Maria, 2017); (Nasution et al., 2019); (Rizqiyati et al., 2019). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga analisis determinan pengalokasian belanja modal menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pengalokasian belanja modal pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang terjadi pasca era reformasi dengan tujuan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga urgensi penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan studi pustaka tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Belanja. Studi pustaka ini menghasilkan sejumlah informasi untuk Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah, dan Belanja sehingga dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah dalam mengelola keuangan Pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang mana penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, instrumen penelitian berdasar pada pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui analisis determinan pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat. Sampel didapat setelah menentukan teknik sampling yang kemudian diartikan sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik

sampling yang ditetapkan pada penelitian ini adalah metode populasi target. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan dan belanja pada 27 Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sampai dengan 2018.

Analisis data bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan data yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan dan menjawab rumusan masalah serta hipotesis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Sekaran & Bougie (2016) bahwa analisis regresi berganda memberikan cara untuk menilai secara obyektif tingkat dan karakter hubungan antara variabel independen dan variabel dependen: koefisien regresi menunjukkan kepentingan relatif masing-masing variabel independen dalam prediksi variabel dependen. Model regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen (Ghozali, 2012).

Lingkup penelitian ditentukan agar penelitian dapat fokus pada tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini akan dibatasi pada data berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Belanja Modal serta lingkup daerah adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ yang berarti asumsi normalitas terpenuhi dimana uji tersebut menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan pembuktian nilai residual. Pemeriksaan hasil uji linieritas dilakukan dengan melakukan tes terhadap kurva hubungan dalam setiap jalur. Bila uji F menghasilkan uji yang signifikan ($p\text{-value} < 0,05$) berarti asumsi linieritas terpenuhi. Hasil uji linieritas dari seluruh jalur memiliki nilai $p\text{-value}$ yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi linieritas memenuhi syarat.

Temuan yang disajikan pada Tabel 1. menunjukkan bahwa pada pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal merupakan dugaan yang pertama, dimana setelah dilakukan uji statistik maka dugaan ini diterima serta terdapat hubungan yang positif. Hal ini sesuai dengan penelitian Andriana & Yuliana (2016), Jaya & Dwirandra (2014), Nuarisa (2013), dan Rizqiyati et al., (2019). Dugaan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah daerah atas

belanja modal pun akan semakin tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi belanja modal yang dialokasikan di kabupaten/kota ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah tersebut. Hal ini terjadi karena alokasi pendapatan asli daerah memiliki kontribusi sangat besar terhadap belanja modal di mana belanja modal tersebut merupakan pengeluaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Rochmatullah et al. (2016) menerangkan bahwa pendapatan asli daerah adalah ukuran dari produktivitas pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh inovasi pemerintah daerah dalam pengembangan aset produktif. Peningkatan dalam inovasi pengembangan aset produktif pemerintah daerah mengarah pada peningkatan dana yang dialokasikan untuk belanja modal.

Tabel 1
Hasil Estimasi Determinan Pengalokasian Belanja Modal

Variabel Independen	Koefisien	<i>p-value</i>
Pendapatan Asli Daerah	0.251	0.017
Dana Perimbangan	0.074	0.529
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-0.039	0.755
Variabel Dependen: Belanja Modal	3.485	0.018

Hasil pengujian menemukan temuan bahwa dugaan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal namun dugaan tersebut ditolak. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Sasana (2011) dan Maria (2017) bahwa dana perimbangan mempunyai hubungan positif dengan belanja modal dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian Sasana (2011) dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah paling besar dalam rangka membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan karena besarnya kebutuhan fiskal daerah yang disertai dengan alokasi yang juga tinggi. Pada penelitian ini alokasi sumber penerimaan daerah tertinggi tahun 2019 pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencakup 56,76 persen pendapatan pemerintah. Sumber lain berasal dari Dana Perimbangan dengan kontribusi sebesar 43,24 persen. Tahun 2018 pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 55,02 persen pendapatan asli daerah; 44,88 persen Dana Perimbangan; dan 0,097 persen lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal tidak berpengaruh dan negatif. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Ramlan et al. (2016) bahwa

lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Perbedaan tersebut dikarenakan observasi penelitian di mana yang satu berada di Provinsi Aceh dan penelitian ini berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat di mana sumber ketiga pendapatan daerah berasal dari pendapatan daerah lain yang sah dengan persentase kecil menggenapkan pendapatan menjadi 100 persen.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah dimana pendapatan daerah bersumber dari salah satunya sumber yang terbesar berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena alokasi pendapatan asli daerah memiliki kontribusi sangat besar terhadap belanja modal di mana belanja modal tersebut merupakan pengeluaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Agar lebih memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat harus mengupayakan agar alokasi realisasi untuk pendapatan asli daerah dan belanja modal lebih ditingkatkan agar dapat melampaui target yang ditetapkan sehingga bisa memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan kedua, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran dan pendapatan belanja negara yang dilalokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara umum proporsi pendapatan asli daerah lebih tinggi daripada dana perimbangan. Pengalokasian anggaran belanja modal baik karena semakin rendah dana perimbangan yang didapatkan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mandiri, dimana tidak bergantung anggaran daerahnya dari Pemerintah Pusat. Kesimpulan ketiga, lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah tidak sampai 1 persen sehingga kebutuhan belanja modal tidak terasa berpengaruh karena persentasenya sangat kecil yang berasal dari sumber pendapatan daerah.

Kontribusi penelitian untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat bahwa antara pihak Bupati/Walikota beserta jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berani mengambil kebijakan tidak populis dimana anggaran belanja modal yang ditingkatkan dengan konsekuensinya anggaran untuk belanja pegawai diturunkan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji ulang mengenai bagaimana belanja di pemerintahan beserta dengan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. L. P. O., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 3(3), 140–146.
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2013). Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Kasus Wilayah Jawa Tengah). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 1(September 2013), 1154–1184.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, I. P. N. P. kartika, & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
- Maharani, M. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. In *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Maria. (2017). Determinan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(2), 113–121.
- Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 8(1), 68–74. <https://doi.org/10.1088/1755-1315>
- Nasution, M., Sriwardany, & Dewi, R. S. (2019). Analisis Determinan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1315–1321.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 89–94. Pemerintah Indonesia. (2014).
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 79–88.
- Rizqiyati, C., Perdana, H. D., & Setiawan, D. (2019). Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal. *Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal*, 7(1), 83–96.
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating the Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 152–166. <https://doi.org/10.23917/jep.v17i2.2082>
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1), 46–58.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Reserach Methods for Bussiness A Skill-Bulding Approach*.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 44–51.
- Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Manajemen*, 3, 51–65. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1293/1290>